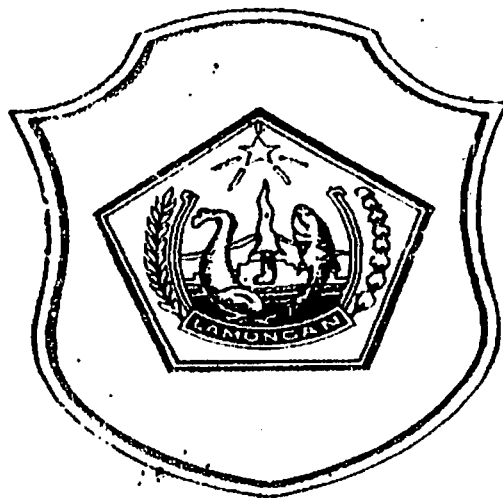


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003**



DESEMBER, 2003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas berkah dan perkenaan Allah SWT serta didorong semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang mencakup Aspek Keuangan, Aspek Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, seiring dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Tahun 2003 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas pada Tahun 2003.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan dari berbagai Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan yang berpegang pada Program Kerja Tahun 2003.

Kami menyadari penyusunan LAKIP ini diperlukan keuletan dan kecermatan terhadap unsur yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, oleh karena itu penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi

penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pendapatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya disampaikan terima kasih dan mohon arahan serta

persetujuan Bapak Bupati Lamongan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini.

Lamongan, Januari 2004

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN



SUHERMAN SH, MM

PEMBINA

NIP 010 204 393



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan kebijakan keuangan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran strategis dalam rangka mengkoordinasikan seluruh Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2003. Lebih lanjut akan dibahas dalam penyusunan LAKIP ini

LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan disusun meliputi :

- Perencanaan Strategis menjelaskan Visi, Misi Nilai dalam Organisasi
- Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi
- Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran
- Akuntabilitas Kinerja meliputi indikator kinerja, capaian kinerja, Aspek keuangan, Strategi Pemecaan Masalah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	:	III
DAFTAR ISI	:	IV
BAB I	:	PENDAHULUAN
		1
		A. Tujuan Pedoman
		1
		B. Pengertian
		2
		C. Persyaratan Pelaksanaan AKIP
		7
BAB II	:	PERENCANAAN STRATEJIK
		14
		A. Komponen Rencana Strategik
		14
		A.1 Visi
		14
		A.2 Misi
		14
		A.3 Tujuan
		17
		A.4 Sasaran
		19
		A.5 Strategi
		20
		B. FORMULIR RENCANA STRATEGI
		21
		C. RENCANA KINERJA
		25
		C.1 Sasaran
		25
		C.2 Program
		26
		C.3 Kegiatan
		27
		D. FORMULIR RENCANA KINERJA
		30
Bab III	:	AKUNTABILITAS KINERJA
		33
		A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
		33
		A.1 Kinerja Kegiatan
		34
		A.2 Pencapaian Sasaran
		37
		B. PENCAPAIAN KINERJA
		41
		B.1 Evaluasi Kinerja Kegiatan
		41
		B.2 Evaluasi Kinerja Program
		42

IV

BAB IV

B.3 Evaluasi Kinerja Kebijakan	43
C. ASPEK KEUANGAN	45
C.1 Belanja langsung	46
C.2 Belanja Tidak Langsung	46
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	47
D.1 Identifikasi Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.	47
D.2 Langkah-Langkah Kebijakan Inovatif	53
PENUTUP	54
A. TINJAUAN	54
B. SARAN TINDAK LANJUT	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PEDOMAN

Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Kegiatan Program dan Kebijakan sesuai dengan tujuan sasaran sekaligus merupakan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sarana Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka visi dan misi serta penjabarannya yang mencakup Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana Prasarana, Metode Kerja Pengendalian Manajemen dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian akan dapat diketahui dan ditelaah serta dicari solusi terhadap permasalahan - permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2003. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun - tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah dengan mengantisipasi hambatan

hambatan yang mungkin akan muncul.

B. PENGERTIAN

1. Instansi Pemerintah

Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini sebagai media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, sehingga tercapai sasaran serta tujuan yang ditetapkan selama Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Rencana Kegiatan yang telah disusun pada Awal Tahun Anggaran 2003 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2003.

2. Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta penjabarannya yang mencakup Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana Prasarana Metode Kerja Pengendalian Manajemen Dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian akan dapat diketahui dan ditelaah serta dicari solusi terhadap permasalahan permasalahan yang

dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2003, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun - tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah dengan mengantisipasi hambatan - hambatan yang mungkin akan muncul.

3. Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

a. Melalui peningkatan pemungutan Pajak Daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak daerah secara optimal, maka penetapan besarnya pajak daerah secara luas dan adil berdasarkan pada obyek dan subyek pajak serta data pajak lainnya yang disampaikan oleh wajib pajak.

b. Melalui Peningkatan pemungutan Retribusi daerah untuk dapat melakukan pemungutan Retribusi daerah secara optimal, maka perlu terus dipayakan intensifikasi terhadap obyek retribusi daerah yang harus diikuti dengan penyelenggaraan pelayanan umum disamping melakukan pembinaan kualitas sumber daya manusia serta kesiepan sarana pemungutan retribusi yang memadai

c. Melalui peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB ini Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendukung pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak dalam rangka pembentukan

Data Base PBB di seluruh Kecamatan. Dukungan ini perlu terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan

4. Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP)

Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan didukung oleh 100 orang dalam jumlah pegawai yang cukup besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Daerah. Upaya peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur perlu terus dilakukan didukung pembiayaan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai.

5. Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur pemungutan Pendapatan Daerah perlu diupayakan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta pendapatan lain dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999.

6. Perencanaan Strategik

Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengawasan pemungutan dalam rangka memahami secara detail tindakan

tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya maka perlu disusun rencana yang matang sebagai rencana detail tindakan peningkatan pendapatan daerah diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Dalam menetapkan indikator kinerja harus berdasarkan pada hasil Perumusan Perencanaan Strategis yang meliputi Tujuan Sasaran dan Strategi Organisasi kemudian diidentifikasi dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja.

Pengalaman atas penyelenggaraan misi organisasi sangat membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan yakni yang outputnya memberikan dampak yang besar disamping memberikan pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan kerja program kerja operasional maupun implementasi kebijakan.

8. Pengukuran Kinerja

Dari evaluasi kegiatan program dan kebijaksanaan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2003 pada umumnya telah berhasil dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat dilihat dalam formulir Pengukuran Kinerja evaluasi kinerja kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa untuk capaian akhir program Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 termasuk dalam kriteria sangat baik.

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan selama Tahun 2003 sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perencanaan Strategih Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memperoleh pembiayaan baik anggaran Belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bersumber dari PAD dan DAU Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lebih Lanjut dapat dilakukan evaluasi aspek keuangan masing masing kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja langsung untuk mendukung kelancaran tugas tugas rutin Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai /Personalia	Rp. 5.583.006.000,-
b. Belanja Barang dan jasa	Rp. 369.400.000,-
c. Belanja perjalanan dinas	Rp. 18.432.500,-
d. Belanja Pemeliharaan	Rp. 32.200.000,-
e. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 708.807.000,-

2. Anggaran Belanja Tidak langsung

a. Proyek Pendataan ulang PBB dengan sistim Sismiop	Rp. 300.000.000,-
b. Penyusunan dokumen RIAP	Rp. 30.000.000,-

C. PERSARATAN PELAKSANAAN AKIP

Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistim yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya yang konsisten dengan azas-azas umum Penyelenggaraan

Negara dalam upaya meningkatkan kualitas dan sumber daya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memantapkan system dan prosedur pemungutan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas staf
 - b. Menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas kepada kepada seluruh staf untuk memudahkan pengawasan pengendalian dan pembinaan.
 - c. Memantapkan kelembagaan termasuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
 - d. Penyediaan dan penyempurnaan sarana administrasi pendukung pelaksanaan system dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam komputerisasi.
2. Komitmen dari Pimpinan dan seluruh Staf Instansi yang bersangkutan.
- Dalam upaya mendukung percepatan mobilisasi Staf baik terkait dengan penyelenggaraan pemungutan pajak retribusi daerah maka diperlukan sarana transportasi yang memadai
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 2003 maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memprioritaskan pada program/ kegiatan sebagai Berikut :
- a. Merealisasikan program / kegiatan pendataan Subyek

PBB dan sarana administrasi perkantoran

b. Mewujudkan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan PAD. Cara mencapai tujuan dan sasaran dalam menetapkan tujuan dan sasaran perlu adanya pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan mempertimbangkan pada kebijaksanaan nasional rencana dan strategi pembangunan Kabupaten Lamongan.

4. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dengan terbentuknya :

VISI : Dapat dijelaskan bahwa masalah kemampuan keuangan daerah merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Di satu pihak dengan Prinsip otonomi daerah, undang - undang mewajibkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik untuk urusan rutin maupun tugas tugas dalam pembangunan daerah. Tetapi dilain pihak, justru pembiayaan urusan rutin rumah tangga daerah otonom ini yang harus dibantu oleh Pemerintah pusat. Kewajiban otonomi tersebut membutuhkan biaya yang seharusnya disediakan sendiri oleh daerah dari sumber keuangannya sendiri (PAID), akan tetapi ternyata di negara manapun sumber - sumber penerimaan pajak dan bukan pajak yang utama selalu dipegang oleh Pemerintah Pusat. oleh karena itu hanya sebagian kecil saja pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dapat dipenuhi dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAID)

MISI : Misi merupakan wujud dari visi organisasi yang tercermin suatu konsep dasar strategis, konsep dasar tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan kerja suatu organisasi Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi penerimaan, Menggali dan mengembangkan sumber sumber pendapatan daerah yang potensial.
- b. Penyempurnaan sistim dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
- c. Peningkatan profesionalisme aparat pemungut.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas serta pengawas pemungutan.
- e. Penegakan hukum perpajakan.

5. Jujur, Obyektif, Transparan dan Akurat.

- Jujur : Dimaksud sebagai ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalagunakan wewenang.
- Obyektif : Dimaksudkan sesuai dengan ketentuan dengan kenyataan yang ada.
- Transparan : terbuka atau dapat dengan mudah diketahui
- Akurat : Tepat pada sasaran

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menyajikan kunci keberhasilan :

- a. Melalui sisdur pemungutan, akan mempermudah WP/WR dan aparatur pengelola pendapatan dalam menentukan dan menghitung sendiri pajak terutang serta mekanisme penyetoran.
- b. Melakukan revisi terhadap Perda pungutan dan secara konsisten melaksanakan pungutan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memanfaatkan karyawan sebagai tenaga penyuluh dan memberikan pembinaan guna membangun kesadaran kepada WP/WR.
- d. Dengan adanya PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah memberi keleluasan Dipenkab Lamongan menentukan jenis

pajak dan retribusi yang potensial.

- e. Menambah sarana dan prasarana dalam rangka menjaring wajib pajak dan wajib Retribusi.
- f. Meningkatkan kerjasama antara staf dan waskal sebagai modal menyusun administrasi pengelola pendapatan yang tranparan dan akurat.
- g. Meningkatkan SDM aparatur

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

A. KOMPONEN RENCANA STRATEGIK

1. VISI

Visi merupakan bentuk wawasan kedepan yang nyata dan jelas dalam arti untuk memperoleh suatu gambaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja yang berkualitas.

Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI PILAR
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH"**

Dari Visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar Dinas Pendapatan Daerah mempunyai komitmen bahwa dinamika perubahan keadaan kearah masa depan agar penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dapat menggerakkan seluruh potensi daerah sebagai pendukung pembiayaan pembangunan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tepat terarah, terencana terpadu, efektif dan efisien dan lebih khusus terhadap unit kerja Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menuju Pemerintah yang baik mampu

menjadi eksekutor dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu guna mewujudkan visi yang tercermin dalam konsep dasar strategi. Konsep dasar tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan kerja suatu organisasi.

Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.
- b. Peningkatan sumber daya aparatur keuangan, sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas serta pengawasan pemungutan.
- e. Penegakan hukum perpajakan.

Dari misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi penerimaan menggali dan mengembangkan sumber - sumber pendapatan daerah yang potensial. Pendapatan Daerah perlu dan terus diupayakan untuk meningkat antara lain :
 1. Melalui peningkatan pemungutan pajak daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak daerah secara optimal, maka penetapan besarnya pajak harus diperhitungkan secara luas dan adil berdasarkan pada obyek dan subyek pajak serta data pajak lainnya yang disampaikan oleh wajib pajak.
 2. Melalui peningkatan pemungutan retribusi daerah untuk dapat melakukan pemungutan retribusi daerah secara optimal maka perlu terus diupayakan intensifikasi terhadap obyek retribusi daerah yang harus diikuti dengan penyelenggaraan pelayanan umum. Disamping melakukan pembinaan kualitas sumber daya manusia serta kesiapan sarana pemungutan retribusi yang memadai.
 3. Melalui peningkatan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pungutan PBB, ini pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendukung pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak dalam rangka pembentukan data base PBB diseluruh

Kecamatan. Dukungan ini perlu terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Penegakan Hukum Perpajakan.

Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan yang berlaku melalui penegakan dan kepastian hukum.

c. Penyempurnaan sistim dan prosedur pemungutan pendapatan daerah. Hal tersebut perlu diupayakan , agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain.

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan , maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menjabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran Organisasi .Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada faktor faktor kunci keberhasilan yang telah

ditetapkan. Hal ini dilaksanakan agar Dinas Pendapatan sebagai perangkat daerah mampu mencapai tujuan dan sasaraannya, sehingga tidak ada sasaran atau aktifitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, oleh karena itu dengan mengetahui faktor- faktor kunci keberhasilan maka Dinas Pendapatan telah memahami apa kelebihan /kekuatan untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktifitas dan tidak melakukan suatu kegiatan apabila terdapat kekurangan - kekurangan.

Adapun tujuan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah dengan menggerakkan dan pendayagunaan aparatur, serta peningkatan kualitas SDM secara maksimal. Pendayagunaan institusi dan mekanisme kerja.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana dinas dan pelayanan publik yang cukup mantap.
- c. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah melalui koordinasi

yang mantap antar Subdin Dipenda dan koordinasi unit/instansi/Dinas Penghasil.

- d. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya penggalan pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah dengan mengoptimalkan penggunaan dan memantapkan anggaran secara terarah pada penjabaran kebijakan pemerintah dibidang Pendapatan Daerah.

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran terhadap tujuan dan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada suatu kurun waktu tertentu dan menggambarkan pula tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta alokasi sumber daya dalam operasional Dinas Pendapatan.

Adapun sasaran dalam Perencanaan Strategik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur untuk mengantisipasi Peningkatan pendapatan daerah sebesar 10 % tiap tahun sampai pada Tahun 2006.
- b. Terwujudnya koordinasi yang mantap sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dalam perumusan dan penjabaran

kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang pendapatan daerah.

- c. Terwujudnya optimalisasi penggunaan dan memantapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan.

5. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, dengan menyiapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya dan keadaan yang dihadapi.

a. Kebijakan.

1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM. Pemberdayaan institusi dan meningkatkan mekanisme kerja
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dinas serta fasilitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan koordinasi secara mantap antar subdin Dispenda dan Koordinasi unit/Dinas/Instansi Penghasil.

4. Mengoptimalkan penggunaan dan memantapkan anggaran dinas dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan.

b. Program.

1. Belanja Pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja Pemeliharaan
4. Biaya Perjalanan Dinas
5. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kota
6. Penerimaan pendapatan daerah melalui peningkatan institusi dan mekanisme kerja

B. FORMULIR RENCANA STRATEJIK

Formulir rencana stratejik ini sebagai alat bantu yang menunjukkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

**Rencana Strategik
Tahun 2002 s/d 2006**

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Visi : Mewujudkan Pendapatan Daerah Sebagai Pilar Pembangunan Daerah

Misi :

- Peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan sumber-pendapatan daerah yang potensial.
- Peningkatan sumber daya aparatur keuangan, peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- Penyempurnaan system dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengawasan pemungutan.
- Penegakan hukum perpajakan.

Tujuan	Uraian	Sasaran	Indikator	Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
				Kebijakan	Program	
1. Mewujudnya upaya pendayagunaan aparatur serta peningkatan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan pendapatan daerah sebesar 10% tiap tahun sampai dengan tahun 2006.	1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah. 2. Peningkatan kualitas SDM UPT Dipenda dan UPT Instansi Ponghasil 3. Peningkatan Instansi perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, LSM, Ormas dan Tckoh Masyarakat dalam pemungutan pendapatan daerah. 4. Peningkatan mekanisme kerja tugas UPT Dipenda dan UPT penghasil dalam rangka pemungutan pendapatan daerah. 5. Peningkatan kinerja dan pendayagunaan aparatur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. 6. Peningkatan Instansi dan Mekanisme kerja	1. Meningkatkan kualitas aparatur SDM, kemampuan institusi dan meningkatnya kualitas kerja. 2. Dana SDM (20%) 3. Outputs: Peningkatan SDM aparatur Dipenda (25%) 4. Outcomes: Memperlancar kegiatan kedinasan (25%) 5. Benefits: Dimilikinya aparatur yang memiliki skil dan tingkat kompetensi yang lebih baik (20%) 6. Impacts: Diperoleh Peningkatan Pendapatan Daerah (10%)	3	4	5	6
					- Mengirim/mengikuti Workshop, pelatihan, diklat teknis manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah - Pembinaan manajemen pendapatan daerah terhadap petugas UPT dinas penghasil secara berkala. - Melakukan koordinasi pengendalian pemungutan melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan. - Melakukan pengawasan Buku Kas penerimaan dan pengendalian administrasi penerimaan penyortiran/lap. Penerimaan pend. Secara berkala thdp. Petugas pemungut dan instansi penghasil. - Pelatihan perpajakan. - Sosialisasi UU Perpajakan. - Sosialisasi UU pajak dan retribusi - Penyuluhan dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi. - Melakukan koordinasi ke KP-PBB Bojonegoro untuk pendataan PBB. - Monitoring pendataan cieh KP-PBB - Pengambilan dan redistribusi SPPT.S.T.T.S. dan DHKP ke seluruh Kecamatan dan BRI. - Memproses rekomendasi pembelian, mutasi keberatan SPPT pada KP-PBB - Membuat laporan dan evaluasi pemasukan PBB secara rutin 1 minggu sekali. - Menginventarisir tunggakan dan penertiban administrasi PBB. - Melakukan penghutungan dan penataan pajak daerah - Mendatar dan mendata semua WPWR melalui SISMIOP - Memberi petunjuk prgisian formulir SPTPD - Jemput Bola pengembalian SPTPD - Menerbitkan SK/PISKR untuk WPWR	Peningkatan SDM aparatur dinas merupakan komponen dalam mewujudkan visi dan misi SDM dimana dalam kegiatannya melibatkan unsur kecamatan/kelurahan/desa sebagai obyek pemungutan dan retribusi

1	2	3	4	5	6
2. Terwujudnya koordinasi yang mantap sesuai tugas pokok dan fungsi Dipenda perumusan kebijakan dan penjabaran kebijakan pemerintah Kab. Lamongan dibidang Pendapatan Daerah.	1. Menetapkan Tupoksi Organisasi Dipenda dengan menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas. 2. Mengadakan Pembinaan operasional Administrasi PAD dan PBB pada UPTD dan Instansi penghasil. 3. Mengadakan Intensifikasi PAD dan PBB ke Kecamatan yang diikuti oleh perangkat desa dan instansi penghasil kecamatan. 4. Koordinasi dan evaluasi penetapan target dan realisasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan 5. Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisa serta penyajian data informasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan 6. Penyusunan dokumen RIAP 7. Melakukan pencatatan SKP/SKR 8. Melakukan pencatatan penerimaan PAD dan WP melalui BKP Dipenda 9. Melakukan pencatatan penerimaan PBB dan BRT	<i>Inputs:</i> Dana (20%) <i>Outputs:</i> Tersedianya data-data pendapatan yang baru (20%) <i>Outcomes:</i> Mempermudah pemungutan pendapatan (15%) <i>Benefits:</i> Tercapainya dan efektifitas efisiensi penerimaan pendapatan daerah (20%) <i>Impacts:</i> Akurasi data manajemen pendapatan (25%)	2. Meningkatkan koordinasi antara subdin Dipenda dan kordinasi unit/dinas/instansi penghasil	1. Peningkatan Koordinasi manajemen pendapatan 2. Peningkatan data riil penyusunan anggaran. 3. Intensifikasi laporan dan evaluasi penerimaan pendapatan.	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dipenda diperlukan Koordinasi dan Pembinaan Intern dan ekstern organisasi guna lebih menantapkan tugas mencapai peningkatan target penerimaan pendapatan daerah. Instansi yang turut mendukung adalah kalangn Perbankan dan Instansi Pemerintah lainnya.

1	4. Terwujudnya Optimalisasi penggunaan anggaran dan dalam mendukung pelaksanaan pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan	1. Mengupayakan peningkatan biaya operasional	Inputs: Dana (20%) Outputs: Kesenjangan dan pendapatan aparatur (15%)	Outcomes: Mengkatnya biaya operasional (20%) dan peningkatan pelayanan meningkat (25%)	1. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana pembangunan.	2. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana pembangunan.	3. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana pembangunan.	4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan.	5. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana pembangunan.	6. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana pembangunan.
---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

12. Mengadakan Pembinaan teknis operasional, Administrasi PAD dan PBB pada UPTD dan Instansi penghasil.
13. Mengadakan Intensifikasi PAD dan PBB ke Kecamatan yang diikuti oleh perangkat desa dan instansi penghasil kecamatan.
14. Koordinasi dan evaluasi penetapan target dan realisasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan.
15. Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisa serta penyajian data informasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan.
16. Penyusunan dokumen RIAP.
17. Melakukan pencatatan SKP/SKR.
18. Melakukan pencatatan penerimaan PAD dari WP melalui BKP Dipenda.
19. Melakukan pencatatan penerimaan PBB dari BRI.
20. Mengupayakan peningkatan biaya operasional.
21. Melakukan upaya peningkatan insentif.
22. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dana perimbangan pemerintah provinsi.
23. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dana perimbangan pemerintah pusat.
24. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian lintas sektoral.

b. Program.

1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan institusi dan meningkatnya kualitas kerja.
2. Meningkatkan koordinasi secara mantap antar subdin Dipenda dan koordinasi unit / dinas / instansi penghasil.

3. Optimalisasi penggunaan dan memantapkan anggaran dinas dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan.

c. Kegiatan.

1. Mengirim/mengikuti workshop, pelatihan, diklat teknis manajemen pengelolaan pendapatan daerah.
2. Pembinaan manajemen pendapatan daerah terhadap petugas UPT dinas penghasil secara berkala.
3. Melakukan koordinasi pengendalian pemungutan melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan.
4. Melakukan pengawasan buku kas penerimaan dan pengendalian administrasi penerimaan penyeteroran, laporan Penerimaan pendapatan secara berkala terhadap petugas pemungut dan instansi penghasil.
5. Pelatihan perpajakan.
6. Sosialisasi UU perpajakan.
7. Sosialisasi UU pajak dan retribusi.
8. Penyuluhan dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi.
9. Melakukan koordinasi ke KP-PBB Bojonegoro untuk pendataan PBB.
10. Monitoring pendataan oleh KP-PBB
11. Pengambilan dan pendistribusian SPPT, STTS, dan DHKP ke seluruh Kecamatan dan BRI.
12. Memproses rekomendasi pembetulan, mutasi keberatan SPPT pada KP-PBB
13. Membuat laporan dan evaluasi pemasukan PBB secara rutin 1 minggu sekali.
14. Menginventarisir tunggakan dan penertiban administrasi PBB.
15. Melakukan penghitungan dan pentapan pajak daerah

16. Mendaftar dan mendata semua WP/WR melalui SISMIOP
17. Memberi petunjuk pengisian formulir SPTPD
18. Jemput Bola pengembalian SPTPD
19. Menetapkan Tupoksi Organisasi Dipenda dengan menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas.
20. Mengadakan Pembinaan teknis operasional, Administrasi PAD dan PBB pada UPTD dan Instansi penghasil.
21. Mengadakan Intensifikasi PAD dan PBB ke Kecamatan yang diikuti oleh perangkat desa dan instansi penghasil kecamatan.
22. Koordinasi dan evaluasi penetapan target dan realisasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan.
23. Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisa serta penyajian data informasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan.
24. Penyusunan dokumen RIAP.
25. Melakukan pencatatan SKP/SKR
26. Melakukan pencatatan penerimaan PAD dari WP melalui BKP Dipenda.
27. Melakukan pencatatan penerimaan PBB dari BRT.
28. Mengupayakan peningkatan biaya operasional.
30. Melakukan upaya peningkatan insentif.
31. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dana perimbangan pemerintah provinsi.
32. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dana perimbangan pemerintah pusat.
33. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian lintas sektoral.

d. Indikator Kinerja Kegiatan.

1. Masukan (*Inputs*)
2. Keluaran (*outputs*).
3. Hasil (*Outcomes*)
4. Manfaat (*Benefits*)
5. Dampak (*Impacts*)

D. FORMULIR RENCANA KINERJA

Formulir RKT

Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2003

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Sasaran		Program		Kegiatan		Ket	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terwujudnya upaya pendayagunaan aparatur serta peningkatan kualitas SDM aparatur			1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan dan institusi meningkatkannya kualitas kerja	1. Mengirim mengikuti Workshop, pelatihan, siklat teknis manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah. 2. Pembinaan manajemen pendapatan daerah temacap petugas UPT dinas penghasil secara berkala. 3. Melakukan koordinasi pengendalian pemungutan melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan. 4. Melakukan pengawasan Suku Kas penerimaan dan pengendalian administrasi penerimaan penyeteroran, lap. Penemuan bend Secara berkala thd. Petugas penungut dan instansi penghasil 5. Pelatihan dan pabakan 6. Sosialisasi UU Perpajakan. 7. Sosialisasi UU Pajak dan retribusi 8. Penyuluhan dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi 9. Melakukan koordinasi ke KP-PBB Bojonegoro untuk pendataan PBB 10. Monitoring pendataan oleh KP-PBB 11. Pengambilan dan pendistribusian SPPT, STTS, dan DHKP ke seluruh Kecamatan dan BRI. 12. Memproses rekomendasi pemberitahuan, mutasi keberatan SPPT pada KP-PBB 13. Membuat laporan dan evaluasi pemasukan PBB secara rutin 1 minggu sekali. 14. Menginventarisir tunggakan dan penerbitan administrasi PBB. 15. Melakukan penghitungan dan penetapan pajak daerah 16. Mendftar dan mendata semua WPWVR melalui SISMIOP 17. Memberi petunjuk pengisian formulir SPPTD 18. Jemput Bola pengembalian SPPTD 19. Menerebitkan SK/PSKR untuk WPWVR	Masukan: Dana SDM Pembayaran	Rubiah Orang Orang	Rp. 2.75 Miliar 103 50 orang
1. Peningkatan Kualitas SDM pengelolaan pendapatan daerah. 2. Peningkatan kualitas SDM UPT Cipenda dan JPT Instansi Penghasil 3. Peningkatan Institusi perangkat Kecamatan, LSM, Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam pemungutan pendapatan daerah. 4. Peningkatan mekanisme kerja petugas UPT Cipenda dan UPT penghasil dalam rangka pemungutan pendapatan daerah. 5. Peningkatan kinerja dan pendayagunaan aparatur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. 6. Peningkatan Institusi dan Mekanisme kerja	Inputs: Dana, SDM Outputs: Peningkatan SDM aparatur Dipenda Outcomes: Mempengaruhi kegiatan pembinaan Benefits: Dimilikinya aparatur yang memiliki skill tingkat kompetensi yang lebih baik Impacts: Dibereleh Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkat 20% Meningkat 25% Meningkat 25 % Meningkat 20% Meningkat 10%					95% (Peningkatan SDM aparatur Dipenda)

Sasaran		Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator		Rencana Tingkat Capaian (target)	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	
1	2	4	3	5	6	7	8
11 Terwujudnya koordinasi yang mantap sesuai tugas pokok dari fungsi Dipenda dalam perumusan dan penjabaran kebijakan pemerintah Kab. Lamongan dibidang Pendapatan Daerah		2. Meningkatkan koordinasi secara mantap antar subdin dipenda dan koordinasi unit / dinas instansi penghasil		1. Menetapkan dengan menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas. 2. Mengadakan operasional Administrasi PAD dan PBB pada UPTD dan instansi penghasil yang diikut oleh perangkat desa dan instansi penghasil kecamatan. 3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi penetapan target dan realisasi sebagai bahan penyusunan APBD dan perhitungan. 4. Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisa serta penyajian data informasi sebagai bahan penyusunan APBD dan perhitungan. 5. Penyusunan dokumen RIAP 6. Melakukan pencatatan SKP/SKR 7. Melakukan pencatatan penemuan PAD dari J/P melalui BKP Dipenda 8. Melakukan pencatatan penemuan PBB dan BRI	Masukan: Dana Keluaran: Kegiatan/data Administrasi Pendapatan Perbaru an Kegiatan 90 % (Peningkatan akurasi data manajemen pendapatan)	Rucian Kegiatan/data	Rp 1.85 Miliar
12 Peningkatan koordinasi dan manajemen pendapatan data ini	Inputs: Dana		Meningkat 20%				
2 Penyusunan anggaran	Outputs: Tersedianya data-data pendapatan yang baru.		Meningkat 20%				
3 Intensifikasi laporan evaluasi dan penemuan pendapatan.	Outcomes: Mempermudah pemungutan pendapatan.		Meningkat 15 %				
	Benefits: Tercapainya efektifitas dan efisiensi penemuan pendapatan daerah		Meningkat 20%				
	Impacts: Akurasi data manajemen pendapatan		Meningkat 25%				

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (target)	Program	Kegiatan		Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Ket	
Uraian	Indikator			Uraian	Indikator Kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. Terwujudnya Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran dalam mendukung pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan.			3. Optimalisasi penggunaan dan memanfaatkan anggaran cins dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan.	1. Mengupayakan peningkatan biaya operasional 2. Melakukan upaya peningkatan insentif 3. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana perimbangan pemerintah provinsi. 4. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana perimbangan pemerintah pusat 5. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian lintas sektoral.	Masukan: Dana	Rupiah	Rp 1.705.385 juta		
1. Peningkatan kesejahteraan aparatur	Inputs: Dana	Meningkat 20%			Keluaran:	Kegiatan		4 peningkatan anggaran	
2. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana perimbangan	Outputs: Kesejahteraan aparatur dan pembinaan aparatur	Meningkat 15%			Hasil:	Persentase		90 % (Peningkatan kesejahteraan aparatur dinas)	
	Outcomes: Meningkatnya biaya operasional dinas	Meningkat 20 %							
	Benefits: Kinerja pegawai meningkat	Meningkat 20%							
	Impacts: Kenyamanan pegawai dan pelayanan meningkat	Meningkat 25%							

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Dalam menetapkan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. Pengalaman atas penyelenggaraan misi organisasi sangat membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan; yakni yang outputnya memberikan dampak yang besar disamping memberikan pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan kerja, program kerja operasional maupun implementasi kebijakan. Dalam mengukur kinerja suatu organisasi digunakan 5 (lima) indikator kinerja yang terdiri dari; indikator kinerja inputs, indikator kinerja outputs, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja benefits, dan indikator kinerja impacts.

Dalam perhitungan sistematisnya, kerangka pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dilakukan melalui pengukuran :

1. Kinerja Kegiatan.

Kinerja Kegiatan Dinas Pendapatan kabupaten Lamongan merupakan lingkak pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam tingkat pengukurannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK):

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2003

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Program	Uraian	Kegiatan Indikator Kinerja	Presentase Pencapaian Rencana				Keterangan
			Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM pembantdayaan dan institusi meringkanya kualitas kerja	1. Mengirim mengikuti Workshop, pelatihan, diklat teknis manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Pembinaan manajemen pendapatan daerah terpadas sebagai UPT dinas penghasil secara berkala 3. Melakukan koordinasi pengendalian pemungutan melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan. 4. Melakukan pengawasan Buku Kas penerimaan dan pengendalian administrasi penerimaan pembayaran pajak. Penerimaan pend. Secara berkala thdp. Petugas pemungut dan instansi penghasil. 5. Pelatihan perpajakan. 6. Sosialisasi UU Perpajakan. 7. Sosialisasi UU pajak dan retribusi 8. Penyuluhan dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi. 9. Melakukan koordinasi ke KP-PBB Bojonegoro untuk pendataan PBB. 10. Monitoring pendataan oleh KP-PBB 11. Pengambilan dan pendistribusian SPPT, STTS dan DHPK ke seluruh Kecamatan dan BRL. 12. Memproses rekomendasi pembelian mutasi kebaran SPPT pada KP-PBB 13. Membuat laporan dan evaluasi pemasukan PBB secara rutin 1 minggu sekali. 14. Menginventarisir tanggakan dan senorban administrasi PBB. 15. Melakukan penghitungan dan pentapan pajak daerah 16. Mendaftar dan mendata semua WPAPR melalui SISMIOP 17. Memberi petunjuk pengisian formulir SPPTD 18. Jemput Bola pengembalian SPPTD 19. Menertibkan SK/PSKR untuk WPAPR.	Masukan Dana SDM Keluaran Hasil	Rupiah Orang Orang persentase	Rp. 2.775 Miliar 102 orang 50 orang 35 % 100 %	Dana = $(2.775 / 2.775) = 100 \%$ 30M = $102/103 \times 100 = 99.02 \%$ $50/50 \times 100 = 100 \%$ $35 - (100-99) \times 100 = \frac{99}{99} = 99.75 \%$		

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Meningkatkan koordinasi secara mantap antar subdin Dipenda dan koor-dinasi unit / dinas- / instansi penghasil	1. Menetapkan Tupoksi Organisasi Dipenda dengan menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas.	Masukan:					
	2. Mengadakan Pembinaan teknis operasional, Administrasi PAD dan PBB pada UPTD dan instansi penghasil.	Dana	Rupiah	Rp 1.85 Miliar	Rp 1.85 Miliar	$\frac{1.85}{1.85} \times 100 = 100 \%$	
	3. Mengadakan Intensifikasi PAD dan PBB ke Kecamatan yang diikuti oleh perangkat desa dan instansi penghasil kecamatan.	Keuaran:	Kegiatan	(9 Kegiatan)	(9 Kegiatan)	$\frac{8}{9} \times 100 = 88.88 \%$	
	4. Koordinasi dan evaluasi penetapan target dan realisasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan						
	5. Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisa serta penyajian data informasi sebagai bahan penyusunan APBD dan Perhitungan.	Hasil	Persentase	90 % (Peningkatan akurasi data manajemen pendapatan)	95 %	$\frac{90 - (95 - 90)}{90} \times 100 = \frac{35}{90} \times 100$	
	6. Penyusunan dokumen RJAP					= 94.4 %	
	7. Melakukan pencatatan SKP/SKR						
	8. Melakukan pencatatan penerimaan PAD dan WP melalui BKP Dipenda						
	9. Melakukan pencatatan penerimaan PBB dari BRI						
3. Optimalisasi penggunaan dan memantapkan anggaran dinas dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan	1. Mengupayakan peningkatan biaya operasional	Masukan:	Rupiah	Rp 1 Miliar 705 Juta 380 Ribu 5 ratus rupiah	Rp 1.705,38.5 Miliar	$\frac{1.705,38.5}{1705,38.5} \times 100 = 100 \%$	
	2. Melakukan upaya peningkatan insentif.	Dana					
	3. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana perimbangan pemerintah provinsi.		Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	$\frac{4}{4} \times 100 = 100 \%$	
	4. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian dana perimbangan pemerintah pusat.	Keuaran:					
	5. Peningkatan biaya koordinasi, pembinaan dan pengendalian lintas sektoral.	Hasil	persentase	95 % (Peningkatan kesejahteraan aparatur dinas)	95 %	$\frac{90 - (95 - 90)}{90} \times 100 = \frac{35}{90} \times 100$	
						= 94.4 %	

2. Pencapaian Sasaran

Tingkat Pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 yaitu :

**Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun 2003**

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Formulir PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.Terwujudnya upaya pendayagunaan aparatur serta peningkatan kualitas SDM aparatur	<i>Inputs:</i> Dana.SDM	25	25	$25 / 25 \times 100 = 100 \%$	
1.Peningkatan Kualitas SDM pengelolaan pendapatan daerah.	<i>Outputs:</i> Peningkatan SDM aparatur Dipenda.	20	18	$18 / 20 \times 100 = 90 \%$	
2.Peningkatan kualitas SDM UPT Dipenda dan UPT Instansi Penghasil.	<i>Outcomes:</i> Memperancar kegiatan kedinasan	25	24	$24 / 25 \times 100 = 96 \%$	
3.Peningkatan Institusi perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, LSM, Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam pemungutan pendapatan daerah.	<i>Benefits:</i> Dimilikinya aparatur yang memiliki skill dan tingkat kompetensi yang lebih baik	20	18	$18 / 20 \times 100 = 90 \%$	
4.Peningkatan mekanisme kerja petugas UPT Dipenda dan UPT penghasil dalam rangka pemungutan pendapatan daerah.	<i>Impacs:</i> Diperoleh Peningkatan Pendapatan Daerah	10	8	$\frac{8 - (10 - 3) \times 100}{8} = \frac{6}{8} \times 100 = 75 \%$	
5.Peningkatan kinerja dan pendayagunaan aparatur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.					
6.Peningkatan Institusi dan Mekanisme kerja					

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2. Terwujudnya koordinasi yang mantap sesuai tugas pokok dan fungsi Dipenda dalam perumusan dan penjabaran kebijakan pemerintah Kab. Lamongan dibidang Pendapatan Daerah 1. Peningkatan Koordinasi manajemen pendapatan 2. Peningkatan data dan Penyusunan anggaran. 3. Intensifikasi laporan dan evaluasi penerimaan pendapatan.	Inputs: Dana	20	20	$20 / 20 \times 100 = 100 \%$	
	Outputs: Tersedianya data-data pendapatan yang baru.	20	17	$17 / 20 \times 100 = 85 \%$	
	Outcomes: Mempermudah pemungutan pendapatan.	15	15	$15 / 15 \times 100 = 100 \%$	
	Benefits: Tercapainya afektifitas dan efisiensi penerimaan pendapatan daerah	20	19	$19 / 20 \times 100 = 95 \%$	
	Impacts: Akurasi data manajemen pendapatan	25	25	$25 / 25 \times 100 = 100 \%$	

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3. Terwujudnya Optimalisasi penggunaan anggaran dan memantapkan dalam mendukung pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pembangunan.	Inputs: Dana Outputs: Kesejahteraan aparatur dan pembinaan aparatur	20 15	20 14	$20 / 20 \times 100 = 100 \%$ $14 / 15 \times 100 = 93.3 \%$	
1. Peningkatan kesejahteraan aparatur 2. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perimbangan biaya dana	Outcomes: Meningkatnya operasional dinas Benefits: Kinerja pegawai meningkat Impacts: Kenyamanan pegawai dan pelayanan meningkat	20 20 25	20 19 25	$20 / 20 \times 100 = 100 \%$ $\frac{19}{20} \times 100 = 95 \%$ $25 / 25 \times 100 = 100 \%$	

B. PENCAPAIAN KINERJA

Sebelum nilai capaian indikator kinerja ditetapkan, terlebih dahulu ditentukan bobot nilai rencana dan nilai realisasi yang dicapai. Hasil Nilai Capaian Kinerja merupakan perbandingan antara nilai realisasi dan nilai bobot dikalikan 100%.

Dari hasil nilai capaian indikator kinerja, kemudian pemberian bobot indikator kinerja pada masing-masing kelompok indikator kinerja (inputs, Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts dengan jumlah bobot untuk setiap kelompok adalah 100%.

Selanjutnya memberikan nilai capaian indikator kinerja dengan cara mengalikan nilai capaian indikator kinerja dengan bobot indikator kinerja dibagi 100%

Dari nilai capaian indikator kinerja, selanjutnya ditentukan evaluasi kinerja sebagai berikut :

a. Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-1)

Tahapan yang diperlukan dalam erentukan evaluasi kinerja kegiatan pertama (EK-1) adalah mengisi kelopak indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang terdiri dari Inputs, Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts. Kemudian pemberian nilai capaian kelompok indikator

kinerja dari pengukuran kinerja ke dalam lajur capaian kelompok indikator kinerja pada formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-1)

Kemudian memberi nilai pada bobot kelompok indikator kinerja yang terdiri dari inputs, Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts. Jumlah setiap bobot kegiatan adalah 100%.

Dari nilai capaian kelompok tersebut diatas dijumlahkan untuk mendapatkan nilai capaian kegiatan.

Nilai capaian tersebut sebagai pengukuran dalam menentukan Evaluasi Kinerja Kegiatan.

b. Evaluasi Kinerja Program (EK-2)

Evaluasi Kinerja Program dilakukan terhadap evaluasi kinerja program dengan mengisi kebijaksanaan dan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Dari kegiatan itu untuk mengisi nilai capaian kegiatan dengan memindahkan jumlah nilai capaian kegiatan pada evaluasi kinerja kegiatan (EK-1), lajur/kolom 7 ke nilai capaian kegiatan evaluasi kinerja program (EK-2). Selajutnya mengisi nilai bobot kegiatan dengan jumlah bobot kegiatan untuk setiap program adalah 100%.

Dari nilai bobot kegiatan tersebut kemudian memberi nilai capaian akhir kegiatan, caranya dengan mengalikani nilai capaian kegiatan dengan bobot kegiatan dibagi 100%.

Untuk mengetahui jumlah nilai capaian program adalah dari nilai hasil nilai capaian akhir kegiatan masing-masing kegiatan dalam satu program dijumlahkan.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan (EK-3)

Dalam menentukan evaluasi kinerja kebijaksanaan adalah evaluasi hasil program yang dicapai dari masing-masing kegiatan dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dinas/instansi pada setiap tahun anggaran.

Cara pengisian formulir (EK-3) diawali mengisi kolom kebijaksanaan dengan uraian kebijaksanaan yang ditetapkan beserta uraian program pada kolom program.

Selanjutnya mengisi kolom nilai capaian program dengan cara memindahkan jumlah nilai capaian program kedalam lajur jumlah nilai capaian program pada kolom 7 form EK-2 kedalam kolom 4 form EK-3. Kemudian mengisi kolom bobot program dengan jumlah bobot program keseluruhan adalah 100%.

Dari uraian tersebut diatas akan diperoleh nilai capaian akhir program dengan cara perkalian antara nilai capaian program dengan bobot program dibagi 100%.

$$\text{Nilai Capaian Akhir Program} = \frac{\text{Nilai Capaian Program} \times \text{Bobot Program}}{100\%}$$

Dalam menentukan nilai capaian kebijaksanaan dengan cara menjumlahkan nilai. Dari jumlah nilai capaian akhir program akan diketahui nilai capaian kebijaksanaan.

Seluruh uraian diatas dapat diketahui secara jelas dari masing-masing Evaluasi Kinerja, baik EK-1, EK-2, EK-3 maupun Pengukuran Kinerja (PK) pada daftar lampiran buku ini.

Dari evaluasi kegiatan, program dan kebijaksanaan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2003 pada umumnya telah berhasil dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat dilihat dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK), Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-1), Evaluasi Kinerja Program (EK-2), dan Evaluasi Kinerja Kebijakan (EK-3) sebagaimana terlampir, menunjukkan bahwa jumlah nilai capaian untuk kebijakan sebesar 89.76 %, dengan berdasarkan skala pengukuran ordinal dibawah ini :

85 s.d 100	= Sangat baik
70 < x < 85	= Baik
55 < x < 70	= Sedang
< 55	= Kurang baik

maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir program Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2003 termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

C. ASPEK KEUANGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2003 sebagaimana yang telah direncanakan dalam perencanaan Strategik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, memperoleh pembiayaan baik dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari PAD dan DAU Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut dapat dilakukan evaluasi aspek keuangan masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

untuk mendukung kelancaran tugas-tugas rutin Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 6.711.845.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai	:	Rp.	5.583.006.000,00
b. Belanja Barang	:	Rp.	369.400.000,00
c. Belanja Pemeliharaan	:	Rp.	32.200.000,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	:	Rp.	18.432.500,00
e. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	:	Rp.	708.807.000,00

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 330 juta dengan perincian sebagai berikut :

a. Proyek Pendataan Ulang PBB dengan sistem SISMIOP	:	Rp.	300.000.000,00
b. Penyusunan Dokumen RIAP	:	Rp.	30.000.000,00

D. Strategi Pemecahan Masalah

1. Identifikasi Masalah dan upaya pemecahan masalah

a. Peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan disamping dibebani tugas pemungutan pajak daerah dan beberapa retribusi daerah, juga berkewajiban melakukan perencanaan, koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah.

Berkenaan dengan itu upaya meningkatkan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah.

Untuk dapat melakukan pemungutan pajak daerah secara optimal, maka penetapan besarnya pajak harus diperhitungkan secara luas dan adil berdasarkan pada obyek pajak dan data pajak lainnya yang disampaikan oleh wajib pajak. Dalam praktek tidak seluruh wajib pajak menyampaikan volume obyek pajak dan data pajak lainnya secara benar dan lengkap sesuai dengan kenyataan dilapangan. Oleh karena itu kegiatan pendataan terhadap obyek pajak harus terus menerus dilaksanakan secara berkala sesuai dengan masa pajak.

2. Peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat yang hasilnya diberikan kepada daerah dan teknik operasional pembayarannya diserahkan kepada daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendukung pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak dalam rangka pembentukan data base PBB di seluruh kecamatan. Dukungan ini dilakukan secara bertahap dimulai sejak tahun anggaran 1992/1993 dan dapat tuntas meliputi 27 Kec. Pada tahun 2003. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mutasi kepemilikan/penguasaan tanah serta bangunan berlangsung secara cepat, sejalan dengan pertumbuhan kawasan. Oleh karena itu hasil-hasil pendataan obyek dan subyek PBB telah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data yang sudah ada. Dalam verifikasi data obyek dan subyek PBB ini, disamping bermaksud menyesuaikan administrasi perpajakan juga menyesuaikan nilai jual obyek pajak sebagai dasar penetapan pajak menurut harga jual yang berlaku,

sehingga kegiatan ini juga akan dapat meningkatkan besarnya penerimaan PBB.

Selain itu dalam rangka mewujudkan terlibat administrasi pembayaran PBB, Pemerintah Kabupaten Lamongan secara rutin juga mendukung penyediaan sarana administrasi pemungutan PBB, berupa blanko/formulir pembayaran sementara dan formulir pelaporan.

3. Pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Meskipun dalam setiap tahun dapat direalisasikan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target yang telah ditetapkan, namun volume penerimaan masih belum sesuai dengan pokok ketetapan. Untuk mencairkan tunggakan PBB tersebut perlu dilakukan penyisiran data tunggakan, sehingga dapat diketahui penanggungjawab tunggakan baik pada tingkat wajib pajak maupun aparat pemungut PBB serta sebab-sebab terjadinya tunggakan PBB dalam rangka penyelesaiannya.

4. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur.

Dengan jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 103 orang diperlukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang handal

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya aparatur ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- i. Memantapkan system dan prosedur pemungutan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas staf.
 - ii. Menetapkan rincian tugas dan pembagian tugas kepada seluruh staf untuk memudahkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
 - iii. Memantapkan kelembagaan termasuk unit pelaksanaan teknis dinas.
 - iv. Penyediaan dan penyempurnaan sarana administrasi pendukung pelaksanaan system dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam komputerisasi.
5. Upaya peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan fasilitas umum perpasaran.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah, maka tersedianya sarana dan prasarana pemungutan serta fasilitas pelayanan umum perpasaran yang memadai mutlak diperlukan.

6. Sarana Transportasi.

Dalam upaya mendukung percepatan mobilisasi staf baik terkait dengan penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah, maka diperlukan sarana transportasi yang memadai, khususnya untuk petugas lapangan.

7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.

Dalam rangka memahami secara detail tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, maka perlu disusun rencana yang matang sebagai rencana detail tindakan peningkatan pendapatan daerah diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan.

Dengan tersusunnya rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah serta hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, maka penerimaan pendapatan daerah dapat diprediksi secara cermat dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan daerah.

8. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perpajakan daerah.

Dimaklumi, bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan itu maka upaya sosialisasi dan penyuluhan perpajakan harus dilakukan sebaik-baiknya.

2. Langkah-langkah kebijaksanaan inovatif

Dengan adanya hambatan/kendala maupun keberhasilan dalam uraian diatas, maka Dipenda menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan inovatif pemecahan masalah sebagai berikut :

- A. Menyusun konsep dasar dan skala prioritas program penerimaan daerah sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah.
- B. Meningkatkan dan menggali sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan potensi daerah dan sumber pendapatan asli daerah.
- C. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi baik vertikal maupun horisontal untuk menentukan informasi data yang akurat guna keseimbangan dan perbandingan program daerah.

D. Pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pajak dan retribusi daerah

P E N U T U P

BAB IV

A. Tinjauan Umum

Sebagai akhir dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2003, hasilnya masih memerlukan kajian dan pemecahan yang integritas antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor Sumber Daya Lain yang mempengaruhi, hal tersebut dikandung maksud untuk mendukung keberhasilan organisasi secara terus menerus melalui peningkatan kemampuan kinerja semua anggota organisasi baik secara individu maupun dalam kelompok.

Akhirnya dengan tersusunnya Akuntabilitas ini diharapkan dapat pula memacu seluruh staf Dipenda semakin meningkatkan kreatifitas, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan misi organisasi guna mewujudkan visi dalam unit organisasi Dipenda Kabupaten Lamongan.

B. Saran Tindak lanjut

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang/badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya itu.

Apabila organisasi tersebut adalah instansi pemerintah, maka akuntabilitas merupakan perwujudan keberhasilan ataupun kegagalannya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yaitu :

- a. Akuntabilitas manajerial
- b. Akuntabilitas proses
- c. Akuntabilitas program

Lamongan, Januari 2004



KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN


SUHERMAN, SH. MM

Pembina
NIP. 010 204 393

**LAMPIRAN LAKIP
DIPENDA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003**

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN
SAKUP MPAT DENGAN AKHIR TAHUN 200**

NO	Uraian	2003		%
		Target	Realisasi	
I	PENDAPT ASLI DAERAH	31.101.378.300,00	32.321.694.510,97	103.92
A	PAJAK	6.328.142.000,00	7.397.214.285,00	116.93
	1. Hotel	8.040.000,00	8.171.500,00	101.64
	2. Restoran	27.672.900,00	29.926.900,00	111.04
	3. Hiburan	85.000.000,00	100.398.450,00	118.12
	4. Reklame	121.150.000,00	127.592.550,00	105.32
	5. Penerangan Jalan	5.925.000.000,00	6.969.076.585,00	117.62
	6. Gal. Gol. C	110.000.000,00	112.038.300,00	101.85
	7. Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.010.000,00	100.02
B	RETRIBUSI	7.568.664.600,00	7.631.931.297,00	100.84
	1. Pely. Kesehatan (Dinkes)	1.000.000.000,00	1.037.301.500,00	103.73
	2. Pel. Kesehatan (RSUD)	1.540.000.000,00	1.653.112.500,00	107.34
	3. Pely. Persampahan	97.250.000,00	97.422.000,00	100.18
	4. Pengg. Bea Cetak KTP	122.000.000,00	176.029.050,00	144.29
	5. Cetak Akta Capil	230.000.000,00	245.247.500,00	106.3
	6. Parkir tepi jalan	347.000.000,00	347.005.500,00	100
	7. Pasar	1.142.000.000,00	1.147.261.150,00	100.46
	8. Penguj. Kend. Berm	305.000.000,00	305.500.000,00	100.16
	9. Pemeriks. APK	8.500.000,00	8.500.500,00	100.01
	10. Pemak. Kekay. Drh	685.551.000,00	691.736.526,00	100.90
	11. Terminal	118.728.000,00	118.836.800,00	100.09
	12. Parkir Khusus	107.323.600,00	87.380.350,00	81.42
	13. Ret. RPH	45.000.000,00	45.001.000,00	100
	14. Tempat Rekr & OR	979.000.000,00	979.013.650,00	100
	15. IMB	215.000.000,00	215.677.306,00	100.32
	16. Ijin Gangguan	55.000.000,00	71.207.625,00	129.47
	17. Ijin Trayek	16.500.000,00	16.536.000,00	100.22
	18. Pasar Burung	12.312.000,00	12.320.000,00	100.06
	19. Jasa Usaha TPI	500.500.000,00	334.842.340,00	66.90
	20. Ijin Usaha Jasa Konstr	42.000.000,00	42.000.000,00	100
C	BAG. LABA BUMD	734.619.000,00	734.619.479,09	100
	1. Bank Jatim	139.494.000,00	139.494.479,09	100
	2. PD. Bank Pasar	393.000.000,00	393.000.000,00	100
	3. PD. Aneka Usaha L.J	202.125.000,00	202.125.000,00	100
D	LAIN-LAIN PENDAPT	16.471.953.000,00	16.557.929.449,88	100.52
	1. Penj. Barang Milik Drh	2.025.000.000,00	2.025.917.000,00	100.05
	2. Jasa Giro	600.000.000,00	1.557.305.187,52	259.55
	3. Sumbangan Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	4. Pen. Usaha Dinas	5.347.883.000,00	4.760.231.450,00	89.01

	5. Pen. Lain-lain	1.514.070.000,00	1.131.522.995,00	74.73
	6. Penerimaan Bunga Deposito	6.970.000.000,00	7.067.952.817,36	101.41
II	DANA PERIMBANGAN	332.957.139.000,00	338.884.222.276,00	101.78
A	BAGI HASIL PAJAK	16.482.575.000,00	18.903.661.363,00	114.69
	1. PBB	12.112.363.000,00	14.727.256.125,00	121.56
	2. BPHTB	1.421.018.000,00	1.306.210.715,00	91.92
	3. Bagi Hsl PPh 21	2.949.194.000,00	2.873.194.523,00	97.42
B	BAGI HSL BUKANPAJAK	1.380.153.000,00	1.203.296.514,00	87.19
	1. PSDH	93.000.000,00	503.878.675,00	541.81
	2. Iuran Eksplorasi	5.707.000,00	0,00	0.00
	3. Hasil Perikanan	957.446.000,00	636.514.423,00	66.48
	4. Gas alam	122.000.000,00	1.271.134,00	1.04
	5. Pemberian HATN	8.000.000,00	1.372.208,00	17.15
	6. Minyak Bumi	194.000.000,00	60.260.074,00	31.06
C	DANA ALOKSI UMUM	296.740.000.000,00	296.740.000.000,00	100
	Dana Alokasi Umum	296.740.000.000,00	296.740.000.000,00	100
D	DANA ALOKASI KHUSUS	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100
	Dana Alokasi Khusus	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100
E	PEN. DAERAH PROP	12.054.411.000,00	15.737.264.399,00	130.55
	1. PBB-KB	4.005.760.000,00	6.958.360.236,00	173.71
	2. PKB-BBNKB	4.300.547.000,00	4.832.878.762,83	112.38
	3. BAGI HASIL ABT-AP	429.293.000,00	479.081.174,00	111.60
	4. Pajak Kendaraan Bermotor	3.302.418.000,00	3.454.379.745,17	104.60
	5. Sumbangan Pihak Ketiga	16.393.000,00	12.564.481,00	76.65
F	LAIN-LAIN PEN. YG SAH	28.692.590.000,00	26.999.386.049,00	94.10
	PEN. DANA PENYEIMB	28.692.590.000,00	26.999.386.049,00	94.10
	1. Bant. Kont./Penyeimbang Pemerintah	23.892.590.000,00	22.713.629.252,00	95.07
	2. Penerimaan Restitusi pph 21	4.800.000.000,00	4.285.756.797,00	89.29
	JUML. PENDAPT DAERAH	392.751.107.600,00	398.205.302.835,97	101.39

Dinas : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
Tahun : 2003

Tahun : 2003		Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja			Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
1	2			Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)		
1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan Institusi dan kualitas kerja.	1. Proyek Pendataan Ulang dengan SISMIOP PBB	3		4	5	6	7	8	9	10		
		Inputs : Dana	Rp.	300 Juta	300 Juta	100	100	100	100			
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs										
		Outputs: Tersedianya data obyek dan subyek PBB di 3 Kecamatan	WP. Desa: Kecamatan	33.976	100	100	100	100	100			
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs										
		Outcomes: Mempermudah penyelenggaraan pemungutan	%	70	60	85.71	100	100	95.71			
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes										
		Benefits: Meningkatkan penerimaan PBB di 3 Kecamatan	%	90	78	86.67	100	100	86.67			
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits										
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts										
		Impacts : Baku PBB di 3 Kecamatan	%	5	40	80	100	100	80			
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts									80	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Meningkatkan data Riil penyusunan anggaran	1. Penyusunan Dokumen RIAP	Inputs : Dana	Rp.	30 Juta	30 Juta	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs					100	100	
		Outputs: Akurasi Data Retribusi Pasar Grosir TPI	Unit (TPI)	5	5	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs					100	100	
		Outcomes: Peningkatan Retribusi Daerah	%	100	80	80	100	80	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes					100	80	
		Benefits: Meningkatnya Potensi Retribusi TPI Kab. Lamongan	%	50	45	90	100	90	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits					100	90	
		Impacts: Dokumen Potensi Retribusi TPI Kab. Lamongan	%	20	17	85	100	85	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts					100	85	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja			Penetapan Capaian Indikator Kinerja				Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1 Optimalisasi penggunaan dan pemantapan anggaran dinas dalam rangka mendukung PAD (Belanja Pegawai, Barang, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas)	2 Gaji dan Tunjangan	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inputs : Dana unit	Rp. orang	1.643.786.000 103	1.486.872.450 102	90.45 99.02	50 50	45.23 49.51	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs						94.73	
		Outputs: Gaji dan Tunjangan	%	100	94.73	94.73	100	94.73	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs						98	
		Outcomes: Diterimanya Gaji dan Tunjangan	%	100	100	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes						100	
		Benefits: Kebutuhan pegawai terpenuhi	%	80	60	75	100	75	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits						75	
		Impacts : Kesejahteraan pegawai meningkat	%	90	70	77.77	100	77.77	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts						77.77	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket	
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Belanja Pegawai	2. Tunjangan Beras	Inputs : Dana	Rp.	96.714.000	96.714.000	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs						100	100	
		Outputs: Tunjangan Beras	%	100	100	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs						100	100	
		Outcomes: Diterimanya Tunjangan Beras	%	100	100	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes						100	100	
		Benefits: Kebutuhan Beras Terpenuhi	%	100	90	90	100	90		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits						100	90	
		Impacts : Kesejahteraan meningkat	%	100	97	97	100	97		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts						100	97	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja			Penetapan Capaian Indikator Kinerja				Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja Pegawai	3. Honorarium dan Vaksinasi	Inputs : Dana	Rp.	308.610.000	257.513.000	33.44	100	33.44	
		Outputs: Honorarium dan vaksinasi	%	100	33.44	33.44	100	33.44	
		Outcomes: Terbayarnya Honorarium dan vaksinasi	%	100	100	100	100	100	
		Benefits: Kebutuhan pegawai terpenuhi	%	10	3	30	100	80	
		Impacts : Motivasi dan semangat kerja meningkat	%	30	80	88.88	100	88.88	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja			Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Belanja Pegawai	5. Insentif	Inputs : Dana	Rp.	3.519.896.000	2.850.874.280	80.99	100	80.99		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs					100	80.99		
		Outputs: Efektivitas kerja tercapai	%	90	75	83.33	100	83.33		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs					100	83.33		
		Outcomes: Citerimanya Insentif Bagi Pegawai	%	90	90	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes					100	100		
		Benefits: Kebutuhan pegawai terpenuhi	%	100	80	80	100	80		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits					100	80		
		Impacs Motivasi dan semangat kerja meningkat	%	20	15	75	100	75		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts					100	75		

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja			Penetapan Capaian Indikator Kinerja				Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bantuan Barang	1. Ongkos Kantor	Inputs : Dana	Rp.	114.400.000	99.872.004	87.3	100	87.3	
		Outputs: Ongkos Kantor	%	100	87.3	87.3	100	87.3	
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs			100	87.3	
		Outcomes: Terbayarnya ongkos kantor.	%	100	100	100	100	100	
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outputs			100	87.3	
		Benefits: Kelancaran tugas-tugas kantor	%	100	95	95	100	85	
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes			100	100	
		Impacts : Tugas Kantor terselesaikan	%	90	34	93.3	100	93.3	
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts			100	93.3	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja Barang	2. Pengadaan Inventaris Kantor	Inputs : Dana	Rp.	255.000.000	254.994.725	99.99	100	99.99	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs					100	99.99	
		Outputs: Pengadaan Inventaris Kantor	%	100	90	90	100	90	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs					100	90	
		Outcomes: Tersedianya Inventaris Kantor	%	15	15	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes					100	100	
		Benefits: Pelaksanaan Tugas Kantor	%	90	85	85	100	85	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits					100	85	
		Impacts : Memperlancar Tugas Kantor	%	80	70	37.5	100	37.5	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts					100	87.5	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1 Pemeliharaan	2 1. Pemeliharaan Gedung dan Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inputs : Dana	Rp.	6.900.000	6.900.000	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs							100
		Outputs: Pemeliharaan Gedung dan Kantor	%	100	90	90	100	90	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok indikator Kinerja outputs							90
		Outcomes: Peningkatan Fasilitas gedung dan kantor	%	80	75	93.75	100	93.75	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes							93.75
		Benefits: Kinerja Pegawai Meningkat	%	20	17	85	100	85	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits							85
		Impacts : Kenyamanan Pegawai dan Pelayanan Meningkat	%	20	15	75	100	75	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts							75

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan	2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Inputs : Dana	Rp.	15.800.000	15.800.000	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs						100	100
		Outputs: Pemeliharaan Kendaraan Dinas	%	90	30	80	100	80	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs						100	30
		Outcomes: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	%	100	100	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes						100	100
		Benefits: Kinerja Pegawai Meningkat	%	20	15	75	100	75	
Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits						100	75		
Impacts : Memperlancar kegiatan operasional kantor	%	20	15	75	100	75			
Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts						100	75		

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan	1. Pemeliharaan Inventaris Kantor	Inputs : Dana	Rp.	9.500.000	9.500.000	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs					100	100	
		Outputs: Pemeliharaan Inventaris Kantor	%	100	100	100	100	100	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs					100	100	
		Outcomes: Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor	%	90	75	83.33	100	83.33	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes					100	83.33	
		Benefits: Kinerja Pegawai Meningkat	%	20	18	90	100	90	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits					100	90	
		Impacts : Memperlancar kegiatan kantor	%	20	16	80	100	80	
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts					100	80	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perjalanan Dinas	1. Perjalanan Dinas Daerah	Inputs : Dana	Rp.	16.992.500	16.992.500	100	100	100	
		Outputs: Perjalanan Dinas	%	100	95	95	100	95	
		Outcomes: Terlaksananya Perjalanan Dinas	%	90	70	87.5	100	87.5	
		Benefits: Uang saku sebagai Perjalanan Dinas	%	90	75	83.33	100	83.33	
		Impacts : Kelancaran Perjalanan Dinas	%	90	75	83.33	100	83.33	

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja				Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Perjalanan Dinas	2. Perjalanan Dinas Tetap	Inputs : Dana	Rp.	1.440.000	1.440.000	100	100	100	100		
		Outputs: Perjalanan Dinas	%	100	95	95	100	95			
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs				100	100		
		Outcomes: Terlaksananya Perjalanan Dinas	%	90	70	87.5	100	87.5			
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes				100	87.5		
		Benefits: Uang saku sebagai Perjalanan Dinas	%	90	70	77.78	100	77.78			
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits				100	77.78		
		Impacts : Kelancaran Perjalanan Dinas	%	90	30	38.89	100	88.89			
				Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts				100	88.89		

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja				Penetapan Capaian Indikator Kinerja				Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)		
1 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2 1. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Inputs : Dana	Rp.	40.000.000	40.000.000	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Inputs				100	100	100		
		Outputs: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pemdes	%	100	90	90	100	90		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja outputs				100	100	90		
		Outcomes: Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pemdes	%	100	100	100	100	100		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Outcomes				100	100	100		
		Benefits: Terpenuhinya Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pemdes	%	90	86	95.55	100	95.55		
		Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Benefits				100	100	95.55		
		Impacts : Pajak dan Retribusi terpenuhi	%	90	90	90	100	90		
Jumlah Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja Impacts				100	100	90				

Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Bobot IK (%)	Nilai Capaian IK (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja Bagi Hasil dan Santuan Keuangan	1. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	Inputs : Dana	Rp.	42.750.000	42.750.000	100	100	100	
		Outputs: Bagi Hasil Pajak Pemerintah Desa	%	100	95	95	100	95	
		Outcomes: Belanja Bagi Hasil Solo Valley	%	80	70	87.5	100	87.5	
		Benefits: Terpenuhinya Bagi Hasil Solo Valley	%	90	70	77.78	100	77.78	
		Impacs : Pembangunan Solo Valley	%	90	80	88.89	100	88.89	

EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Dinas : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
Tahun : 2003

Form :EK-1

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan Institusi dan kualitas kerja.	1. Proyek Pendataan Ulang PBB dengan SISMIOP	Inputs	100	30	30
			Outputs	100	20	20
			Outcomes	85.71	10	8.57
			Benefits	86.67	25	21.67
			Impacts	80	15	12
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	92.24
2.	Meningkatkan data Riil penyusunan anggaran	1. Penyusunan Dokumen RIAP	Inputs	100	20	20
			Outputs	100	20	20
			Outcomes	80	30	24
			Benefits	90	20	18
			Impacts	85	10	8.5
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	90.5

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Optimalisasi penggunaan dan pemantapan anggaran dinas dalam rangka mendukung PAD (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Bagi Hasil)	1. Gaji dan Tunjangan	Inputs	94.73	20	18.95
			Outputs	94.73	20	18.95
			Outcomes	100	15	15
			Benefits	75	20	15
			Impacts	77.77	25	19.25
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	87.15
		2. Tunjangan Beras	Inputs	100	15	15
			Outputs	100	15	15
			Outcomes	100	15	15
			Benefits	90	25	22.5
			Impacts	97	30	29.1
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2		100	96.6

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Pegawai	3.Honorarium dan Vakasi	Inputs	83.44	20	16.67
			Outputs	83.44	20	16.67
			Outcomes	100	25	25
			Benefits	80	15	12
			Impacts	88.88	20	17.78
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3		100	88.12
		4.Lembur	Inputs	80.89	20	16.17
			Outputs	83.33	25	20.83
			Outcomes	100	30	30
			Benefits	80	15	12
			Impacts	75	10	7.5
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4		100	86.5

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	5. Insentif	Inputs	80.89	20	16.17
			Outputs	83.33	25	20.83
			Outcomes	100	30	30
			Benefits	80	15	12
			impacts	75	10	7.5
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5					100	86.5

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Barang	1. Ongkos Kantor	Inputs	87.3	15	13.09
			Outputs	87.3	10	8.73
			Outcomes	100	20	20
			Benefits	35	30	25.5
			Impacts	93.3	25	23.32
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	90.64
		2. Inventaris Kantor	Inputs	99.99	10	9.99
			Outputs	90	25	22.5
			Outcomes	100	12	12
			Benefits	85	28	23.8
			Impacts	87.5	25	21.8
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2		100	90.09

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan	1. Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Inputs	100	15	15
			Outputs	90	10	9
			Outcomes	93.75	20	18.75
			Benefits	85	45	38.25
			Impacts	75	10	7.5
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	88.5
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Inputs	100	20	20
			Outputs	80	25	20
			Outcomes	100	15	15
			Benefits	75	20	15
			Impacts	75	20	15
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2		100	85

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan	3.Pemeliharaan Inventaris Kantor	Inputs	100	15	15
			Outputs	100	20	20
			Outcomes	83.33	20	16.66
			Benefits	90	35	31.5
			impacts	80	10	8
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3		100	91.16

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perjalanan Dinas	1. Perjalanan Daerah	Inputs	100	20	20
			Outputs	95	22	20.9
			Outcomes	87.5	15	13.12
			Benefits	83.33	28	23.3
			impacts	83.33	15	12.4
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	89.72
				2. Perjalanan Tetap	Inputs	100
Outputs	95	25			23.75	
Outcomes	87.5	28			24.5	
Benefits	77.78	12			9.33	
Impacts	88.89	10			8.89	
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2		100			89.72	

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten	Inputs	100	20	20
			Outputs	90	22	20.9
			Outcomes	100	15	13.12
			Benefits	95.55	28	23.3
			Impacts	90	15	12.4
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1		100	89.72
		2. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	Inputs	100	30	30
			Outputs	95	25	23.75
			Outcomes	87.5	28	24.5
			Benefits	77.78	12	9.33
			Impacts	88.89	10	8.89
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2		100	89.72

EVALUASI KINERJA PROGRAM

Dinas : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
Tahun : 2003

Form : EK-2

No.	Kebijakan (Rencana Operasional)	Program	Kegiatan	Nilai Capaian Kinerja (%)	Bobot Kegiatan (5)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya upaya pendayagunaan aparatur serta pengukuran kualitas SDM	1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan institusi dan kualitas kerja	1. Proyek Pendataan ulang PBB dengan SISMIOP	92.24	100	92.24
Jumlah Nilai Capaian Program 1					100	92.24
2.	Terwujudnya Koordinasi yang mantap, sesuai dengan tugas pokok dinas	1. Meningkatkan Data Riil Penyusunan Anggaran	1. Penyusunan Dokumen RIAP	90.5	100	90.5
Jumlah Nilai Capaian Program 1					100	90.5
3.	Terwujudnya Optimalisasi penggunaan dan pemantapan anggaran dalam mendukung PAD	1. Belanja Pegawai	1. Gaji dan Tunjangan	87.15	15	13.07
			2. Tunjangan Beras	96.6	15	14.49
			3. Honorarium dan vakasi	88.2	30	26.46
			4. Lembur	86.5	25	21.62
			5. Insentif	86.5	15	12.97
Jumlah Nilai Capaian Program 1					100	88.61

No.	Kebijakan (Rencana Operasional)	Program	Kegiatan	Nilai Capaian Kinerja (%)	Bobot Kegiatan (5)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terwujudnya Optimalisasi penggunaan dan pemantapan anggaran dalam mendukung PAD	2. Belanja Barang	1. Ongkos Kantor	90.64	50	45.32
			2. Inventaris Kantor	90.09	50	45.04
		Jumlah Nilai Capaian Program 2			100	90.36
		3. Pemeliharaan	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	88.5	30	26.55
			2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	85	35	29.75
			3. Pemeliharaan Inventaris Kantor	91.16	35	31.90
		Jumlah Nilai Capaian Program 3			100	88.2
		4. Perjalanan Dinas	1. Perjalanan Dinas Daerah	89.72	50	44.86
			2. Perjalanan Dinas Tetap	89.72	50	44.86
		Jumlah Nilai Capaian Program 4			100	89.72
		5. Belanja Bagi Hasil dan Keuangan	1. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten	89.72	50	44.86
			2. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	89.72	50	44.86
		Jumlah Nilai Capaian Program 5			100	89.72

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
Tahun : 2003

Form : EK-3

No.	Kebijakan (Rencana Operasional)	Program	Nilai Capaian Program (%)	Bobot Program (%)	Nilai Capaian Akhir Program
1	2	3	5	6	7
1.	Terwujudnya upaya pendayagunaan aparatur serta pengukuran kualitas SDM	1. Meningkatkan daya guna aparatur dan kualitas SDM, pemberdayaan institusi dan kualitas kerja	92.24	10	9.22
2.	Terwujudnya koordinasi yang mantap sesuai dengan tugas, pokok Dinas	1. Meningkatkan data nil penyusunan anggaran	90.5	10	9.05
3.	Terwujudnya optimalisasi penggunaan dan pemantapan anggaran dalam mendukung PAD	1. Belanja Pegawai. 2. Belanja Barang 3. Pemeliharaan 4. Perjalanan Dinas 5. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	88.61 90.36 88.2 89.72 89.72	15 20 15 15 15	13.29 18.07 13.23 13.45 13.45
		Jumlah Nilai Capaian Kebijakan		100	89.76